



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA**

**RANCANGAN RENJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KECAMATAN BATUR**

**KECAMATAN BATUR
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renja Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

Rancangan Renja Perubahan Kecamatan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Renja Perubahan Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan tersebut berpedoman pada RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, Renstra Kecamatan Batur Tahun 2023-2026, dan Rancangan Awal Renja Kecamatan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara, 07 Agustus 2023

CAMAT BATUR,

AJI PILUROSO, S.STP
Pembina Tk I
NIP. 19820415 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum2

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan.....7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 9

TAHUN LALU.....Error! Bookmark not defined.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....22

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 29

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat. 38

2.6. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Program dan Kegiatan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara..... 38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 39

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....39

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah40

3.3 Matrik Program dan Kegiatan Tahun 2023 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH 43

BAB V PENUTUP..... 46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara13

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara[23](#)

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023..29

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023[38](#)

Tabel 2.5. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Program dan Kegiatan Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara 38

Tabel 3.3. Matrik Program dan Kegiatan Tahun 2023 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat

daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
25. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 27).
26. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2023 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;

- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2023;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2023.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi Urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan, dan 28 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.140.894.900,- dengan fokus utama pada mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan (*uraikan prioritas daerah tahun 2021 yang didukung oleh Perangkat Daerah*). Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada.
2. Administrasi desa tentang pengelolaan surat, pengelolaan arsip dan pengelolaan asset desa belm tertib.
3. Kinerja Lembaga-lembaga desa belum berfungsi maksimal
4. Administrasi keuangan desa yang belum tertib.
5. Administrasi pengadaan barang dan jasa di desa belum maksimal.
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelunasan PBB.
7. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan administrasi pengurusan dokumen. Dari 5 program, 10 kegiatan, dan 21 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat

Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 5 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2.005.634.700,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 5 program, 10 kegiatan, dan 21 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp Rp1.990.689.700,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021, program/kegiatan/subkegiatan yang berkurang meliputi,

1. Subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
3. Subkegiatan fasilitasi administrasi tata administrasi pemerintah daerah
4. Subkegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

Dinamika yang terjadi selama tahun 2021 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi;

1. Subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
3. Subkegiatan fasilitasi administrasi tata administrasi pemerintah daerah
4. Subkegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Persyaratan administrasi keuangan dalam standarisasi BBM perjalanan dinas.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya koordinasi yang baik dari Camat sampai ke staf kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsi di Kecamatan Batur.
2. Merencanakan program kerja, target kinerja dan dituangkan dalam anggaran.

3. Melaksanakan dan melaporkan program kerja, target kinerja yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka tidak tercapainya indikator program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis tentang administrasi keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa.
2. Menyelenggarakan bimbingan teknis administrasi perkantoran dan inventaris asset desa.
3. Menyelenggarakan bimbingan teknis Lembaga-lembaga desa

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2023 Semester 1* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
7.01.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
7.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SKM	81,125	78	81,125	0 (57,94)	0%	78,5	156,2	1,93

7.01.0 1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	93,75%	93,75%			
7.01.0 1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokmen	25 dokumen	8 dokmen	7 dokumen	87,5%	8 dokumen	40 dokumen	100
7.01.0 1.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	25 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	35 dokumen	100
7.01.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	84,72%	84,72%	100%	100%	
7.01.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100%	16 orang	92 orang	
7.01.0 1.2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi	72 dokumen	72 dokumen	72 dokumen	63 dokumen	87,5%	72 dokumen	207 dokumen	

		Keuangan SKPD								
7.01.0 1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bln/Semesteran SKPD	Terpenuhinya Laporan Keuangan Bln/Semesteran SKPD	6 laporan	6 laporan	4 laporan	4 laporan	66,67%	2 lapoaran	10 laporan	
7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya a Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	83,34%	83,34%	100%	100%	
7.01.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		3 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	5 paket	
7.01.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		18 paket	6 paket	4 paket	66,67%	6 paket	30 paket	
7.01.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	0%	0%			
7.01.0 1.2.07 .11	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercukupinya sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 unit	16 unit	2 unit	0 unit	0%	-unit	18 unit	

		Bangunan Lainnya								
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	50%	50%			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air da Listrik	Terbayarkann ya jasa rekening listrik	12 laporan	3 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	1 paket	5 paket	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkan ya honor PTT dan THL	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50 %	4 orang	20 orang	
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeilharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	35,8 %	35,8 %	100%	100%	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terpeliharanya dan terbayarkanya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	7 unit	9 unit	7 unit	4 unit	57,14%	7 unit	20 paket	

7.01.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	12 unit	4 unit	0 unit	0%	4 unit	16 unit	
7.01.0 1.2.09 .10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	3 unit	6 paket	2 paket	1 paket	50%	2 paket	9 paket	
7.01.0 2	Program Penyelnggran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelnggran Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	100%	12,5%	12,5	100%	100%	
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	100%	100 %	100%	0 %	0%	100%		
	Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan	1 dok	0 dok	1 dok	0 dok	0%			

	Prasarana Pelayanan Umum	Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								
7.01.0 2.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat	Prosentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat		100%	100%	25%	25	100%	100%	
7.01.0 2.2.04 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg terkait dengan Nonperijinan	Terlayannya Pelayanan Masyarakat dalam Pelayanan KTP dan KK	12 laporan	24.000 pemohon	12 laporan	6 laporan	50 %	8000 pemohon	38.625 pemohon	
7.01.0 2.2.04 .03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dgn kewenangan lainnya yg dilimpahkan	Jumlah pelunasan PBB	1 laporan	SPPT Rp. 2.092.874.862	1 laporan	0 laporan	0%	Rp. 1.107.264.680	Rp. 4.181.117.111	

7.01.05	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	100%	0%	0	100%	100%	
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		100%	100%	0%	0	100%	100%	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	jumlah laporan koordinasi pimpinan di kecamatan	1 laporan	36 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan	37 laporan	37
7.01.06	Prog Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	100%	70,1	70,1	100%	100%	
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Prosentase Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan		100%	100%	70,1	70,1	100%	100%	

		pengawasan pemerintahan desa								
7.01.0 6.2.01 .01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kades	jumlah desa tertib administrasi dan peraturan kepala desa yang sesuai ketentuan	48 dokumen	8 desa	48 dokumen	38 dokumen	79,2%	8 desa	8 desa	
7.01.0 6.2.01 .02	Fasilitasi adm Tata Pemerintah Desa	Jumlah desa tertib administrasi umum	32 dokumen	8 desa	32 dokumen	28 dokumen	87,5%	8 desa	5 desa	
7.01.0 6.2.01 .03	Fasilitasi pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan asset desa	Jumlah desa tertib administrasi Keuangan desa dan Pendayagunaan asset desa	56 dokumen	24 desa	56 dokumen	32 dokumen	57,14%	8 desa	5 desa	
7.01.0 6.2.01 .06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pemilihan kepala desa yang terfasilitasi	0 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	100%	- desa	- desa	
7.01.0 6.2.01 .09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dgn Pembangunan dsa	Jumlah desa tertib administrasi pembangunan	1 dokumen	8 desa	1 dokumen	1 dokumen	100%	8 desa	8 desa	

7.01.0 6.2.01 .11	Fasilitasi Penyelenggaraan ketemtraman dan ketertiban umum	Terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum	2 dokumen	1 pengaduan	2 dokumen	1 dokumen	50%	1 pengaduan	- pengaduan	
7.01.0 6.2.01 .16	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah desa tertib administrasi lainnya	2 dokumen	8 desa	2 dokumen	1 dokumen	50%	8 desa	6 desa	
7.01.0 6.2.01 .17	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah koordinasi pendampingan desa yang menjadi kewenangan kecamatan	3 Laporan	8 desa	3 Laporan	2 Laporan	66,67%	8 desa	8 desa	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai target Kinerja Organisasi pada tahun 2023 ini Kecamatan Batur mempunyai 2 Indikator Sasaran Strageis sebagai berikut :

Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik yang diukur melalui indikator Nilai IKM dengan target sebesar 81,125 pada tahun 2023,pada table 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 Semester belum dapat dinilai karena proses Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan pada semester 2.

Sasaran Strategis ini didukung 2 Program Kegiatan yaitu

- 1.1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 1.2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Adapun analisis Kinerja dari ke 2 program tersebut diatas sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang didukung oleh 2 indikator kegiatan dan 3 indikator sub kegiatan, sampai dengan triwulan II ini indikator program yang dicapai sebesar 12,5% dari target 100% pada ahir tahun 2023
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, didukung 5 indikator kegiatan dan 12 indikoator sub kegiatan, sampai dengan triwulan II ini indikator program yang dicapai sebesar 57,94% dari target 100% pada ahir tahun 2023.

1. Sasaran Strategis yang ke dua yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Nilai AKIP OPD didukung oleh 2 Program Kegiatan sebagai berikut:

1.1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa didukung 1 (satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa hingga triwulan II ini sebesar 70,1% dari target diakhir tahun sebesar 100%

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, capaian kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sampai dengan triwulan ini sebesar 0% dari target 100% diakhir tahun 2023

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator. Dari 3 indikator tersebut, Nilai IKM dan Nilai SAKIP berstatus tercapai dan prosentase pelunasan PBB indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Adanya koordinasi yang baik dari Camat sampai ke staf kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsi di Kecamatan Batur.
2. Merencanakan program kerja, target kinerja dan dituangkan dalam anggaran.
3. Melaksanakan dan melaporkan program kerja, target kinerja yang telah dilaksanakan.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai IKM		√	78	78,5	81,12 5	-81,2	81,1 25		78,5	80	
2	Nilai SAKIP		√	CC	B	CC	CC	CC		CC	CC	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2023 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan administrasi pengurusan dokumen;
3. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
4. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
6. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
8. Baru 50% desa menjadi Desa Tanggap Bencana;
9. Masih rendahnya kesadaran warga akan kebersihan dan tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah Akhir di Kecamatan Batur;

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian

indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja
2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan
4. Kurangnya bintek kepada perangkat desa tentang administrasi keuangan dan administrasi tata pemerintahan desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
2. Masih kurangnya jumlah Aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat
3. Masih kurangnya dukungan anggaran serta sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Kecamatan.
4. Beberapa program/ kegiatan dilaksanakan oleh OPD langsung ke desa/ kelurahan dan kurang koordinasi dengan kecamatan;
5. Kurangnya koordinasi saat mengharuskan lebih banyak daring tanpa banyak sentuhan fisik, seharusnya lebih mempercepat proses pelayanan karena tidak ada batasan ruang dan waktu.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2023 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kapasitas dan kompetensi perangkat desa
2. Sarana dan prasarana pendukung yang masih minim

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota mempunyai 6 (enam) Kegiatan yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai 3 (tiga) sub Kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Bahan Logistik Kantor
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, Listrik.
 2. Penyedia Jasa Pelayanan umum Kantor
 - 6) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 3. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 Kegiatan antara lain :
- i. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan 2 (dua) sub Kegiatan antara lain:
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan.
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang lain yang dilimpahkan.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan
1 (satu) Kegiatan yaitu
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan :
 1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di
kecamatan.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,
dengan satu kegiatan yaitu :
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri
 1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa.
 2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan
Aset Desa
 4. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan Pembangunan Desa
 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
 6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Kewilayahan	Kec. Batur				Urusan Kewilayahan	Kec. Batur				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Batur	Nilai SKM			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Batur	Nilai SKM			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kec. Batur	Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	400.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kec. Batur	Prosentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	400.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Batur	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perencanaan	10 dokumen	400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Batur	Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perencanaan	10 dokumen	400.000	

			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Batur	Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Batur	Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	0	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Batur	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.820.253.223	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Batur	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.820.253.223	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Batur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 OB	1.767.988.223	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Batur	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	16 OB	1.767.988.223	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 dokumen	51.660.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 dokumen	51.660.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kec. Batur	Jumlah Laporan Keuangan Bln/Semesteran SKPD	8 laporan	605.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kec. Batur	Jumlah Laporan Keuangan Bln/Semesteran SKPD	8 laporan	605.000	

	Bln/Semester an SKPD					Bln/Semester an SKPD					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Batur	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	129.236.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Batur	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	129.236.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Batur	Jumlah paketperalatan dan perlengkapan kantor	1 paket	10.952.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Batur	Jumlah paketperalatan dan perlengkapan kantor	1 paket	10.952.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Batur	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket	118.283.900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Batur	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket	118.283.900	
	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Batur	Prosentase Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	14.691.000	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Batur	Prosentase Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	14.691.000	
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Batur	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	14.691.000	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Batur	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	14.691.000	

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Batur	Prosentase Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	117.430.825	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Batur	Prosentase Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	117.430.825	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kec. Batur	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	22.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kec. Batur	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	22.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Batur	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	95.430.825	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Batur	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	95.430.825	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Batur	Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		42.576.400	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Batur	Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		42.576.400	
	Penyediaan jasa pemeliharaan,	Kec. Batur	Jumlah kendaraan perorangan	6 unit	16.076.400	Penyediaan jasa pemeliharaan	Kec. Batur	Jumlah kendaraan perorangan	6 unit	16.076.400	

	Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Batur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2 unit	19.400.000	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Batur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2 unit	19.400.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Batur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	4 unit	7.100.000	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Batur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	4 unit	7.100.000	
	Program Penyelnggran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Batur	Prosentase Penyelnggran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	65.714.900	Program Penyelnggra n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Batur	Prosentase Penyelnggran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	65.714.900	
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan	Kec. Batur	Prosentase Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan	100 %	0	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan prasarana	Kec. Batur	Prosentase Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan	100 %	0	

	sarana pelayanan Umum		prasarana dan sarana pelayanan Umum			dan sarana pelayanan Umum		prasarana dan sarana pelayanan Umum			
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	0	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat	Kec. Batur	Prosentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat	100 %	65.714.900	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat	Kec. Batur	Prosentase Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kpd Camat	100 %	65.714.900	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan	Kec. Batur	Jumlah laporan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 laporan	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan	Kec. Batur	Jumlah laporan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 laporan	0	

	Perizinan Non Usaha					Perizinan Non Usaha					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg terkait dengan Nonperijinan	Kec. Batur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	7.831.200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg terkait dengan Nonperijinan	Kec. Batur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	7.831.200	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dgn kewenangan lainnya yg dilimpahkan	Kec. Batur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	57.883.700	Pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dgn kewenangan lainnya yg dilimpahkan	Kec. Batur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	57.883.700	
	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec. Batur	Prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		12.150.000	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec. Batur	Prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		12.150.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Batur	Prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		12.150.000	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Batur	Prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		12.150.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Kec. Batur	jumlah dokumen koordinasi	1 dokumen	12.150.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Kec. Batur	jumlah dokumenkoordinasi	1 dokumen	12.150.000	

	pimpinan di kecamatan		pimpinan di kecamatan			pimpinan di kecamatan		inasi pimpinan di kecamatan			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Batur	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		32.032.900	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Batur	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		32.032.900	
	Kegiatan Fasilitas, rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Batur	Prosentase Kegiatan Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		32.032.900	Kegiatan Fasilitas, rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Batur	Prosentase Kegiatan Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		32.032.900	
	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kades	Kec. Batur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	4.254.700	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kades	Kec. Batur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dokumen	4.254.700	
	Fasilitas adm Tata	Kec. Batur			0	Fasilitas adm Tata	Kec. Batur			0	

	Pemerintah Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen		Pemerintah Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	32 Dokumen		
	Fasilitasi pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan asset desa	Kec. Batur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	0	Fasilitasi pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan asset desa	Kec. Batur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	56 Dokumen	0	
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dgn Pembangunan desa	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	6.795.800	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dgn Pembangunan desa	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	6.795.800	
	Fasilitasi Penyelenggaraan ketemtraman	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	2 Dokumen	6.806.600	Fasilitasi Penyelenggaraan ketemtraman dan	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	2 Dokumen	6.806.600	

	dan ketertiban umum		Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum			ketertiban umum		Penyelenggara an Ketenterama n dan Ketertiban Umum			
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Masyarakat Desa	2 Dokumen	4.305.800	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaa n masyarakat desa	Kec. Batur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Masyarakat Desa	2 Dokumen	4.305.800	
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec. Batur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampinga n Desa di Wilayahnya	3 Laporan	9.870.000	Koordinasi pendampinga n desa di wilayahnya	Kec. Batur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampinga n Desa di Wilayahnya	3 Laporan	9.870.000	
			TOTAL		2.234.485.748				TOTAL	2.234.485.748	

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor masih kurang dan usianya sudah tua sehingga sering mengalami kerusakan;
2. Kapasitas dan Kompetensi perangkat Desa masih rendah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata Kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestariankebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasiberagama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dankreativitas.
3. Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. Penegakan hokum nasional;
 - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;dan
 - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang dimaksud adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal tersebut seperti yang dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah Kecamatan Baturtelah menetapkan rencana strategis Kecamatan Batur Tahun 2017-2022 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Batur guna pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2017 - 2022.

Rencana strategis Kecamatan Batur tahun 2017 – 2022 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui Program Pelayanan Administrasi perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur, program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program Penataan Administrasi kependudukan, program Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Dan Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Batur selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan secara terus menerus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sehingga mampu menciptakan pelayanan prima yang memenuhi standar pelayanan terhadap permintaan masyarakat.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan

yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. VISI adalah visi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih sebagai berikut :

“ Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera “

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Batursebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari lima misi tersebut adalah Misi Kedua dan Keempat yaitu:

1. **Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;**

Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean goverment. Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Melalui fokus pertama, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus kedua, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

2. **Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produkif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;**

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean goverment, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efesien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Perumusan tujuan strategis memungkinkan Kecamatan Baturuntuk mengukur sejauh mana kinerja PD dalam membantu

tercapainya visi misi Kepala Daerah. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai survey kepuasan Masyarakat
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel
3. Meningkatnya PAD

Ketiga tujuan dan sasaran strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat, Tujuan akhir dari Kecamatan Batur adalah menerapkan prinsip *good governance* di lingkungan Kecamatan Batur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka harus ditopang dengan Sumber Daya Manusia yang trampil, pintar, profesional, berprestasi tinggi adalah dambaan bagi setiap lembaga/organisasi baik di sektor pemerintah maupun di dunia swasta, serta adanya dukungan dari sarana prasarana pada Kecamatan Batur yang memadai.

3.3 Program dan Kegiatan

(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023																										
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas										
									Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif					
7				UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	01			KECAMATAN																0	2,446,253,455	2,256,576,748			2,208,999,620	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah/kota	%		%	100 %	100 %		0	2,303,974,655	2,146,678,948				100 %	2,027,665,620							
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %		0	6,710,300	400,000				100 %	7,935,300							
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 Dokumen	10 Dokumen		0	2,010,800	400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.	Kecamatan Batur	10 Dokumen	2,260,800	Kecamatan Batur				
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima dengan Prosedur yang jelas	%		%	100 %	100 %		0	1,951,899,631	1,820,253,224				100 %	1,754,235,900							
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			16 Orang/bulan	16 Orang/bulan		0	1,898,540,131	1,767,988,224		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.	Kecamatan Batur	16 Orang/bulan	1,713,000,000	Kecamatan Batur				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			72 Dokumen	72 Dokumen		0	48,660,000	51,660,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.	Kecamatan Batur	72 Dokumen	37,320,000	Kecamatan Batur				
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			8 Laporan	8 Laporan		0	4,699,500	605,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.	Kecamatan Batur	8 Laporan	3,915,900	Kecamatan Batur				
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %		0	132,755,500	129,236,500				100 %	70,244,600							
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket		0	10,952,600	10,952,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	Kantor Kecamatan Batur	1 Paket	10,244,600	Kecamatan Batur				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket		0	121,802,900	118,283,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	Kantor Kecamatan Batur	12 Paket	60,000,000	Kecamatan Batur				
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %		0	52,602,000	36,782,000				100 %	25,000,000							

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0	52,602,000	36,782,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.	Kantor Kecamatan Batur	4 Unit	25,000,000	Kecamatan Batur
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	0	117,430,824	117,430,824						100 %	117,191,920	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0	22,000,000	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	Kantor Kecamatan Batur	12 Laporan	26,400,000	Kecamatan Batur
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	0	95,430,824	95,430,824		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.	Kantor Kecamatan Batur	13 Laporan	90,791,920	Kecamatan Batur
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%		%	100 %	100 %	0	42,576,400	42,576,400						100 %	53,057,900	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	0	16,076,400	16,076,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	Kantor Kecamatan Batur	6 Unit	16,857,900	Kecamatan Batur
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0	19,400,000	19,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	Kantor Kecamatan Batur	2 Unit	29,100,000	Kecamatan Batur
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0	7,100,000	7,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.	Kantor Kecamatan Batur	4 Unit	7,100,000	Kecamatan Batur
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	0	65,714,900	65,714,900						100 %	71,284,000	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	0	7,831,200	7,831,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.	Kecamatan Batur	12 Laporan	8,784,000	Kecamatan Batur
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	0	57,883,700	57,883,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.	Kecamatan Batur	1 Laporan	62,500,000	Kecamatan Batur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	0	12,150,000	12,150,000					100 %	13,800,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	0	12,150,000	12,150,000					100 %	13,800,000		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	12,150,000	12,150,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menerapkan nilai luhur agama dan budaya masyarakat.	Kecamatan Batur	1 Dokumen	13,800,000	Kecamatan Batur
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%		%	100 %	100 %	0	48,167,300	32,032,900					100 %	76,250,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	0	48,167,300	32,032,900					100 %	76,250,000		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				48 Dokumen	48 Dokumen	0	4,254,700	4,254,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.	Kecamatan Batur	48 Dokumen	5,060,000	Kecamatan Batur
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0	6,795,800	6,795,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang DEMOKRATIS dan bertanggung jawab.	Kecamatan Batur	1 Dokumen	9,520,000	Kecamatan Batur
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	0	6,806,600	6,806,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.	Kecamatan Batur	2 Dokumen	10,025,000	Kecamatan Batur
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	0	4,305,800	4,305,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.	Kecamatan Batur	2 Dokumen	960,000	Kecamatan Batur
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				3 dokumen	3 dokumen	0	9,870,000	9,870,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.	Kecamatan Batur	3 dokumen	25,275,000	Kecamatan Batur
TOTAL													0	2,446,253,455	2,256,576,748						2,208,999,620	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2017-2022. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan di

Sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran,
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan gedung lainnya.

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu

- a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, yang terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, yaitu:
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. **Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
4. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahanan Desa** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 07 Agustus 2023


CAMAT BATUR,
AJI PILUROSO, S.STP
Pembina Tk I
NIP. 19820415 200112 1 003